



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL NON  
TUNAI (BSNT) DALAM MENGURANGI ANGKA KEKURANGAN GIZI  
(STUNTING) DI DESA MUARA BASUNG DURI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas  
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Hak cipta milik UIN Suska

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh H
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



imkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**GITA TIARA**  
**(11775200058)**

**PROGRAM STUDI S1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2021/2022**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : GITA TIARA  
**NIM** : 11775200058  
**PROGRAM STUDI** : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI ILMU DAN SOSIAL  
**JUDUL** : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM  
BANTUAN SOSIAL NON TUNAI (BSNT)  
DALAM MENGURANGI ANGKA  
KEKURANGAN GIZI (STUNTING) DI DESA  
MUARA BASUNG DURI

DISETUJUI OLEH  
DOSEN PEMBIMBING



Abdiana Ilosa, S.Ap.,MA  
NIP. 19870716 201503 2003

DEKAN  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PROGRAM STUDI  
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos.,M.si  
NIP. 19790101 200710 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : GITA TIARA**  
**NIM : 11775200058**  
**FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM  
BANTUAN SOSIAL NON TUNAI (BSNT) DALAM  
MENGURANGI ANGKA KEKURANGAN GIZI  
(STUNTING) DI DESA MUARA BASUNG DURI**  
**TANGGAL UJIAN : 9 JULI 2021**

Disetujui Oleh  
KETUA PENGUJI



**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
**NIP.19790101 200710 1 003**

PENGUJI I



**Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si**  
**NIK. 130712074**

PENGUJI II



**Mashuri, MA**  
**NIP. 19770721 201411 1 002**

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL NON TUNAI (BSNT) DALAM MENGURANGI ANGKA KEKURANGAN GIZI (STUNTING) DI DESA MUARA BASUNG DURI

Oleh :  
GITA TIARA  
NIM : 11775200058

Penelitian ini dilaksanakan di daerah/wilayah yang sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat program Bantuan Sosial Non Tunai yakni di Desa Muara Basung Duri. Bantuan Sosial Non Tunai adalah sebuah program bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang kemudian diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik yang digunakan untuk membeli bahan sembako di E-warong. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Bantuan Sosial Non Tunai Dalam Mengurangi Angka Kekurangan Gizi (Stunting) di Desa Muara Basung Duri dan 2) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Desa Muara Basung Duri. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas dari Makmur (2011:7) dengan indikator a) Ketepatan Penentuan Waktu b) Ketepatan dalam Menentukan Pilihan c) Ketepatan dalam Menentukan Tujuan d) Ketepatan ketepatan Sasaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Sosial Non Tunai di Desa Muara Basung Duri Dalam Mengurangi Angka Kekurangan Gizi (Stunting) masih dikategorikan sudah cukup efektif hal ini dikarenakan dengan adanya program Bantuan Sosial Non Tunai yang dibuat oleh pemerintah untuk menekan adanya angka kekurangan gizi (Stunting) di Desa Muara Basung Duri sudah dapat menekan adanya angka stunting ini dikarenakan bahan sembako yang dipakai dalam pendistribusian bahan sembako sangat memperhatikan nutrisi nabati dan hewani. selain itu dapat lihat masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program Bantuan Sosial Non Tunai dan ketidaksesuaian bahan sembako yang diberikan. Selain itu juga masih mengalami kendala-kendala saat melakukan pencarian dana disebabkan oleh kartu error, saldo kosong dan Id ganda.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pelaksanaan, Bantuan Sosial Non Tunai, Stunting

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu"alaikum warahmatulahir wabarakatu*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta"ala atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang Dhoif ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya. Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlul baitnya (Shallallâhu „alaihi wa âlihi wa sallam), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu penulis mohon maaf kepada pembaca. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, wawak, kakak dan adek tersayang beserta keluarga yang senantiasa memberikan do'a restu penulis sehingga dapat melaksanakan penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
2. Bapak Prof. Dr.Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat dimana penulis banyak menimba ilmu.
3. Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. tempat di mana penulis menimba banyak ilmu di sana.
4. Bapak Dr. Kamaruddin. S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat di mana penulis menimba banyak ilmu di sana.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, tempat di mana penulis masih menimba banyak ilmu disana.
6. Bapak Dr, Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc.Sc selaku penasehat akademis.
7. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos.,M.Si selaku Penasehat Akademis sekaligus yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP, MPA selaku Pembimbing Proposal sekaligus Pembimbing skripsi, yang telah bersedia membimbing dan memberikan masukan dan arahan serta menjadi tempat diskusi dan konsultasi demi lancarnya penulisan Skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Program Studi Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
10. Sahabat seperjuangan Intan Deska Pratiwi, Yenny Martha Diana Nugraha, Tetty Salmiah P, Jumiaty Dwi Rahma yang telah berjuang bersama selama masa kuliah ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan penulis dan sahabat bertukar pikiran, Arif Budiman, Khotimmatul Khasanah selama penulisan Skripsi ini.
12. Seluruh teman Administasi Negara 2017 Lokal E yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap kebersamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan yang kita miliki bersama.
13. Terimakasih untuk Kantor Desa Muara Basung dan seluruh perangkat Desa yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis dalam melakukan penelitian. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran bagi penulis kedepannya. Terima kasih.

Pekanbaru, 9 Juli 2021  
Penulis

**GITA TIARA**  
11775200058

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Batasan Penelitian.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	13
2.2 Konsep Efektivitas .....	15
2.2.1 Pengukuran Efektivitas .....	16
2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas.....	19
2.3 Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT).....	21
2.3.1 Dasar Hukum Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT).....	22
2.3.2 Tujuan dari Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT).....	23
2.3.3 Manfaat Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT).....	23
2.3.4 Kriteria Penerima Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) .....	24
2.3.5 Prinsip Pelaksanaan Program .....	25
2.3.6 Mekanisme dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) di Tahap Persiapan .....	25
2.3.7 Tahap Pemanfaatan .....	27
2.3.8 Kartu Keluarga Sejahtera .....	28
2.3.9 Besaran Manfaat.....	29
2.3.10 Bahan Sembako.....	29
2.4 Konsep Kemiskinan.....	30
2.4.1 Indikator Kemiskinan.....	31
2.5 Kekurangan Gizi (Stunting).....	32
2.5.1 Pengertian Gizi (Stunting).....	32
2.5.2 Penyebab kekurangan gizi (stunting).....	33
2.5.3 Dampak kekurangan gizi (stunting) .....	34
2.5.4 Faktor-Faktor yang mempengaruhi kejadian kekurangan gizi (stunting).....	35



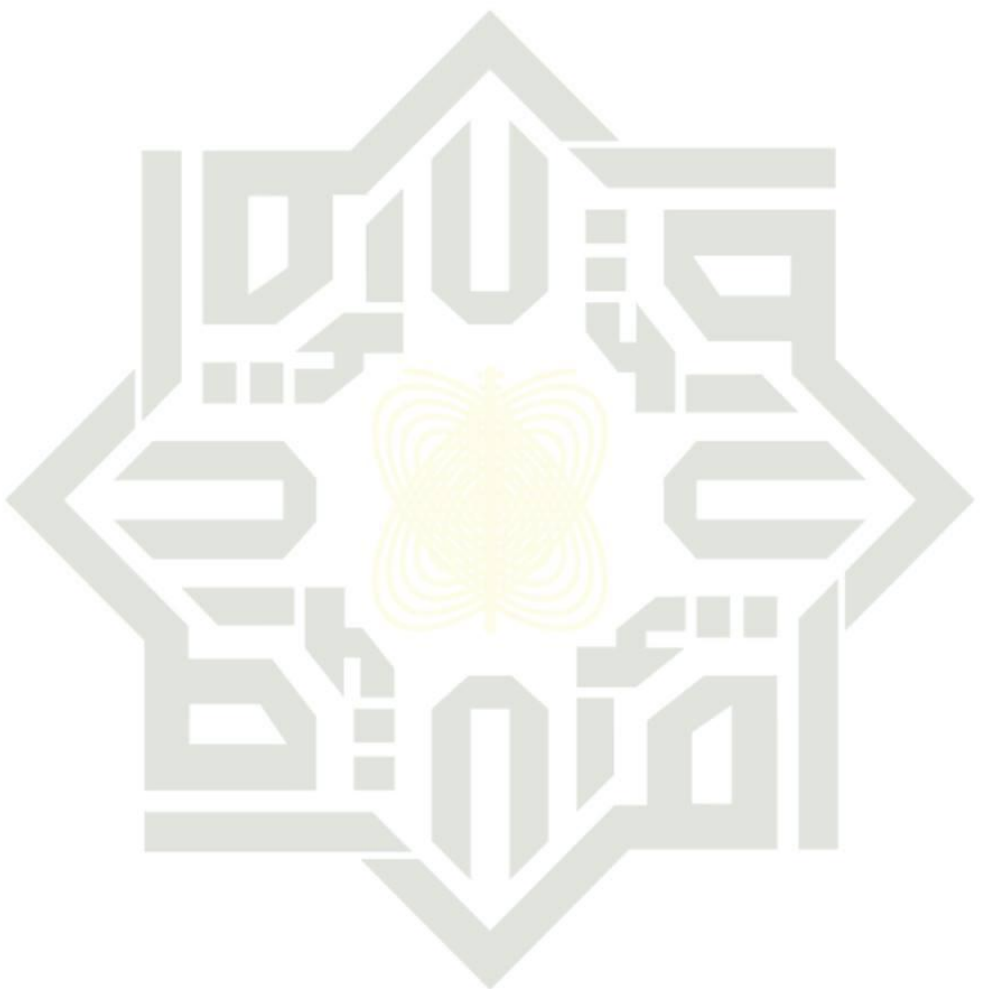
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6	Pandangan Islam tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Miskin).....	40
2.7	Kajian Terdahulu .....	43
2.8	Defenisi Konsep.....	46
2.9	Kerangka Pemikiran.....	48
2.10	Konsep Operasional .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>52</b>
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	52
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	52
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	53
3.4	Informan Penelitian.....	54
3.5	Metode Analisa Data.....	55
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>57</b>
4.1	Desa Muara Basung .....	57
4.1.1	Sejarah Desa Muara Basung .....	57
4.1.2	Demografi .....	58
4.1.3	Keadaan Sosial .....	59
4.1.4	Keadaan Ekonomi .....	60
4.1.5	Kondisi Pemerintahan Desa .....	60
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>68</b>
5.1	Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Dalam Mengurangi Angka Kekurangan Gizi (Stunting) di Desa Muara Basung Duri .	68
5.1.1	Ketepatan Penentuan Waktu .....	70
5.1.2	Ketepatan dalam Menentukan Pilihan.....	73
5.1.3	Ketepatan dalam Menentukan Tujuan.....	77
5.1.4	Ketepatan-ketepatan Sasaran .....	80
5.2	Kendala dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) di Desa Muara Basung Duri .....	81
5.2.1	Kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan BSNT .....	81
5.2.2	Bahan Sembako yang Tidak Sesuai .....	82
5.2.3	Tidak Bisa Melakukan Transaksi.....	82
5.3	Pembahasan Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai Dalam Menekan Angka Kekurangan Gizi (Stunting) di Desa Muara Basung Duri. ....	83
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>85</b>
6.1	Kesimpulan .....	85
6.2	Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>88</b>



<b>DRAF WAWANCARA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

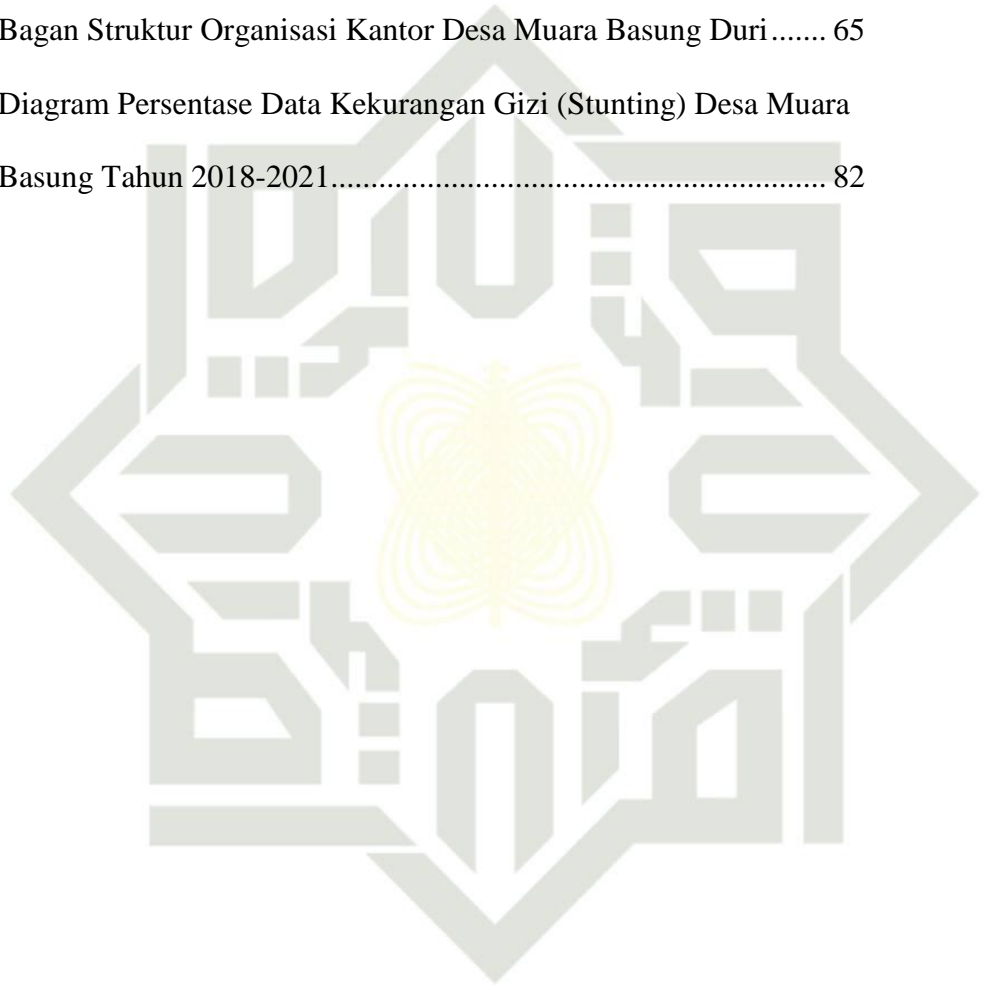
Tabel 1.1	Data Jumlah Penduduk Desa Muara Basung Duri .....	4
Tabel 1.2	Penerima Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) di Desa Muara Basung Duri .....	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 2.2	Konsep Operasional .....	48
Tabel 3.1	Key Informan .....	52
Tabel 4.1	Data Lembaga Desa Muara Basung .....	58
Tabel 4.2	Data lembaga Kemasyarakatan Desa Muara Basung .....	59

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Persentase Data Kekurangan Gizi (Stunting) Desa Muara Basung Duri Tahun 2018-2020 .....	4
Gambar 2.1	Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).....	27
Gambar 2.2	Karangka Pemikiran .....	49
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Kantor Desa Muara Basung Duri.....	65
Gambar 5.1	Diagram Persentase Data Kekurangan Gizi (Stunting) Desa Muara Basung Tahun 2018-2021.....	82



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara, pemerintah Indonesia memiliki peran yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat tentunya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Ada beberapa fungsi pemerintah salah satunya adalah fungsi sekunder yang di dalamnya ada fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Dari fungsi tersebut maka upaya yang dilakukan pemerintah adalah menjalankan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang didalam program tersebut tentunya ada berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program-program tersebut.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Untuk fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu (Julianty Thesa Takaredase, 2019).

Kemiskinan menurut (Todaro 2002) merupakan salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh negara berkembang. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan



bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Ratna Dewi, 2021). Selanjutnya kemiskinan juga merupakan suatu kondisi dan keadaan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Menurut Muttaqien menjelaskan bahwa secara umum akibat yang akan ditimbulkan dari permasalahan kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, sembako dan papan. Hilangnya hak akan pendidikan, hak akan kesehatan, tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, termarginalkan dari hak akan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, dan hak atas kebebasan hidup (Ana Rosalina, 2019).

Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, maka dikeluarkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, “Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat (Rohana Tiara, 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada Maret tahun 2018 penduduk miskin Indonesia berjumlah 25,95 juta jiwa dan September tahun 2019 25.14 juta jiwa sedangkan kemiskinan yang berada di provinsi Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

September Tahun 2018 penduduk miskin Provinsi Riau berjumlah 494,26 ribu jiwa atau sebesar 7,21 persen. Sedangkan pada September Tahun 2019 penduduk miskin di Provinsi Riau berjumlah 483,92 ribu jiwa atau sebesar 6,90 persen. Sementara itu Garis Kemiskinan mengalami peningkatan pada Tahun 2018 dengan jumlah Rp. 70,75 juta perkapita sedangkan pada Tahun 2019 berjumlah 71,12 juta perkapita.

Pemerintah dituntut untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan. Ini dilakukan melalui program penanggulangan kemiskinan, salah satu program yang disediakan oleh Pemerintah sendiri guna mengurangi masalah masyarakat dalam menghadapi kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari adalah Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT). Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) adalah bantuan sosial yang diberikan atau dibagikan secara non tunai berupa sembako dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, melalui akun elektronik yang telah bekerjasama dengan Bank Negara yang digunakan untuk membeli bahan sembako di E-Warong. Program bantuan sosial sembako sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Sembako Nontunai (BPNT) pada tahun 2017 di 44 kota terpilih (Yunus, 2019).

Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Sembako yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Sembako Nontunai di seluruh Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM (Suci Laurentia, 2021). Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial non tunai, maka program BSNT dikembangkan menjadi program Sosial. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.200.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya (Supiani, 2020).

Perlindungan sosial masyarakat akan sembako diberikan dalam bentuk bantuan sosial non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial non tunai bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan sembakonya, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM berupa tambahan ayam, sayuran, buah-buahan, tape dan tahu, ini didapatkan karena adanya temuan kasus dari kekurangan gizi (stunting) maka dari itu dibuatlah kebijakan Pemerintah dari program BSNT dengan menambah besaran uang di program tersebut agar menekan/mengurangi adanya kasus dari kekurangan gizi (stunting) . Selain itu juga program sosial non tunai juga bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan tujuan penerimaan Bantuan sosial bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan sembako dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Ika Surya Kharismawati, 2018).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekurangan gizi (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir ini disebabkan karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman sembako dan sumber protein hewani (Kemenkes RI, 2018). Kekurangan Gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal dan setelah bayi lahir, akan tetapi kondisi kekurangan gizi (stunting) akan terlihat setelah bayi berusia 2 tahun. Anak yang menderita kekurangan gizi (stunting) berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja, tetapi juga pada kecerdasan, produktivitas dan prestasinya kelak setelah dewasa. Faktor penyebab dari kekurangan gizi (stunting) yaitu pada asupan makanan yang tidak seimbang, kurangnya pengetahuan ibu terhadap kesehatan dan gizi sebelum dan masa kehamilan serta setelah melahirkan, dan tidak menerima makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI). Adapun faktor resiko terkena kekurangan gizi (stunting) yaitu pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, tinggi badan orang tua, status gizi. Berikut adalah Tabel Jumlah kekurangan gizi (stunting) di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018-2020.

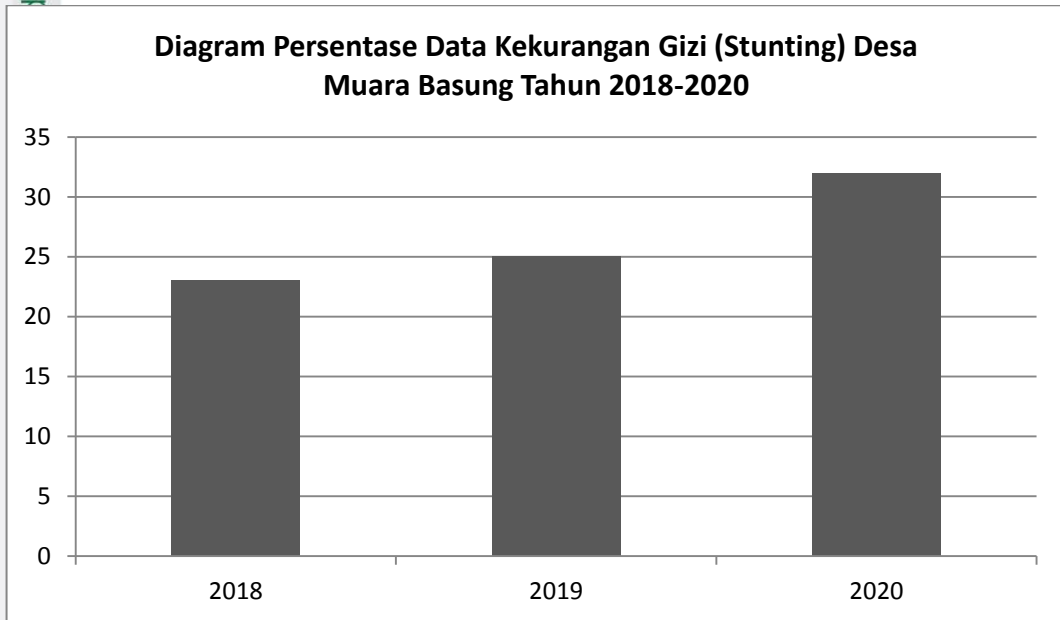
#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 1.1**  
**Persentase Data Kekurangan Gizi (Stunting) Desa Muara Basung**  
**Tahun 2018-2020**



Sumber : Data Posyandu Desa Muara Basung Duri

Berdasarkan data diatas dapat dilihat masih meningkatnya setiap tahun jumlah angka kekurangan gizi (stunting) di Desa Muara Basung yang terdapat dikecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, pada Tahun 2018 terdapat jumlah angka Kekurangan gizi (Stunting) sebanyak 22,5 % dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah angka kekurangan gizi (Stunting) sebesar 25 % , Sedangkan Angka kekurangan gizi (stunting) dengan jumlah peningkatan paling banyak terdapat pada tahun 2020 yaitu 32 % . Dengan demikian berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 angka kekurangan gizi (stunting) di Desa Muara Basung Duri mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Oleh karena itu pemerintah membuat program BSNT tersebut guna menekan adanya angka kekurangan gizi (stunting) tersebut disetiap tahunnya akan bertambah meningkat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) disalurkan ke beberapa kabupaten/kota terpilih di Indonesia yang dinilai memiliki kesiapan dari segi akses dan fasilitas untuk melaksanakan program tersebut.

Salah satu Kabupaten/kota untuk menjadi sasaran penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yaitu Kabupaten Bengkalis Kota Duri tepatnya di salah satu Desa yaitu Desa Muara Basung yang terpilih untuk menjadi sasaran penyaluran bantuan Sosial Non Tunai dengan jumlah sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 326 penerima. Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) mulai dilaksanakan di Desa Muara Basung Duri sejak tahun 2019 akhir. Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) di Desa Muara Basung ini disalurkan melalui Elektronik Warung (E-Warong). E-Warong adalah agen bank atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai Tempat. Berikut adalah data jumlah penduduk Desa Muara Basung Tahun 2020 :

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Penduduk di Desa Muara Basung Tahun 2020**

Lokasi	Jumlah RW	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
LK I	10 RW	11.195	2.771

Sumber : Data Kantor Desa Muara Basung Duri 2020

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwasannya jumlah penduduk Desa Mura Basung pada tahun 2020 yaitu sebanyak 11.195 dengan jumlah KK sebanyak 2.771 KK. Dari jumlah Kepala Keluarga yang ada di Desa Muara Basung terdapat sebagian dari mereka yang termasuk kedalam kategori tidak mampu/miskin dan terdaftar sebagai penerima program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT). Berikut data jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin dan data jumlah penerima Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) tahun 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Penerima Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) di Desa Muara Basung Tahun 2020**

No	Jumlah Kepala Keluarga (KK)Miskin	Tahun	Penerima BSNT
1	600 Kepala Keluarga	2019	437 KK
2	587 Kepala Keluarga	2020	450 KK
3	587 Kepala keluarga	2021	326 KK

Sumber : Data Kantor Desa Muara Basung 2021

Jika dilihat dari jumlah kepala keluarga miskin dan data penerima BPNT, masih ada 261 kepala keluarga yang belum mendapatkan program BPNT. Selain persoalan diatas, terdapat persoalan lainnya terkait dengan penerima program BSNT yakni terdapat masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial ganda, dimana mereka terdaftar sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dan juga terdaftar sebagai penerima bantuan sosial Non PKH atau BSNT. Menurut skema pemberian bantuan sosial, bahwasannya program BSNT atau yang dikenal dengan Non PKH ini diberikan hanya kepada KPM yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH. Namun yang terjadi dilasembako, terdapat beberapa kepala keluarga yang mendapatkan kedua program sosial tersebut. Berdasarkan uraian dan indikasi diatas, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT). Mengingat pentingnya pelaksanaan dari sebuah program sosial pemerintah dalam upaya untuk mengentas kemiskinan dan juga meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat sehingga diperukan upaya pelaksanaan program yang efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan yang mana Presiden sangat



menagapresiasi program BSNT dimana ini telah diatur dalam PERMENSOS No. 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan PERPRES RI No. 63 Tahun 2017 Tentang Bantuan Sosial dengan Non Tunai.

Suatu program dibentuk pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berhasil atau tidaknya program pemerintah, dapat dilihat dari tercapai atau tidak tercapainya tujuan dari program tersebut. Target adanya suatu program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, namun juga berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pelaksanaan yang efektif sehingga tujuan dapat tercapai.

Keberhasilan suatu program dapat dilihat melalui pengukuran efektifitas. Menurut Makmur (Ana Rosalina, 2019) menjelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari indikator-indikator menentukan tujuan dan ketepatan-ketepatan sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas diperlukan karena efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan, atau program.

Berdasarkan uraian permasalahan dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) diatas, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pengukuran efektivitas agar program ini berjalan optimal dan indicator keberhasilan tujuan dapat tercapai. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Di Kota Duri, khususnya studi di Desa Muara Basung. Dalam hal ini penulis mengangkat judul ***“Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Dalam Mengurangi Angka Kekurangan Gizi (Stunting) di Desa Muara Basung Duri”***.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Dalam Mengurangi Angka Kekurangan Gizi (Stunting) di Desa Muara Basung Duri ?
2. Apa Saja Kendala Yang di Hadapi Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunia (BSNT) Dalam Mengurangi Angka Kekurangan Gizi (Stunting) di Desa Muara Basung Duri ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Dalam Mengurangi Angka Kekurangan Gizi (Stunting) di Desa Muara Basung Duri
2. Untuk Mengetahuai Apa Saja Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Dalam Mengurangi Angka Kekurangan Gizi (Stunting) di Desa Muara Basung Duri

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
 

Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya

2. Bagi Objek Penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk memperbaiki kearah yang lebih baik lagi

3. Bagi Objek Pustaka

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

#### 1.4 Batasan Penelitian

1. Pada Analisis ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT)
2. Penelitian ini dilakukan di Desa sebagai penerima bantuan BSNT di Kantor Desa Muara Basung

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk Mempermudah memahami isipenelitian ini, maka penulis memaparkan dalam sistematika penulisan :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang masalah yang berhubungan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penulisan, sertasistematika penulisan.

#### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori-teori tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Dalam Mengurangi Angka Kekurangan Gizi (Stunting) di Desa Muara Basung Duri.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian

### **BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian, serta saran yang diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan dapat di artikan sebagai suatu ketetapan yang di pilih untuk di ambil. Kebijakan merupakan pilihan tindakan yang lahir dari berbagai alternatif yang ada, kemudian di analisis secara mendalam dan bermuara kepada keputusan alternatif terbaik. Kebijakan juga merupakan beberapa keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik dengan tujuan tertentu beserta cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah dipilih.

Menurut Carl J. Federick (Taufiqurokhman, 2014) menyebutkan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Kebijakan publik dalam artian luas, dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1981), adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Kalimat ini mengandung makna bahwa apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternative pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan (Subianto: Menurut Jefkins (Rusli, 2013) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian keputusan-keputusan yang saling terkait berkenaan dengan penilaian tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu”.

Sedangkan menurut Freidrich (Rusli, 2013 :33) mengatakan bahwa





kebijakan adalah: “Suatu tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan/pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan tantangan-tantangan yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita/mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tersebut”. Mengenai pengertian kebijakan publik, banyak para ahli-ahli kebijakan yang memberikan pendapatnya masing-masing mengenai definisi kebijakan publik yang semua benar dan saling melengkapi.

Menurut Dunn (2013:132) menyebutkan istilah Kebijakan Publik (*Public Policy*) sebagai: “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”. Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, diaman didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah suatu Kebijakan publik apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan harus dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasi agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Sedangkan Kebijakan publik dalam artian luas, dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1981), adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Kalimat ini mengandung makna bahwa apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





kebijakan dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan (Subianto: 3).

Selanjutnya Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan public adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat”.

## 2. Konsep Efektivitas

Efektivitas yang berasal dari kata efektif adalah suatu cara untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program.

Efektivitas juga merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan efektif apabila kegiatan dilaksanakan dengan benar dan dengan hasil yang bermanfaat. Sehingga efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan, apakah memberikan hasil sesuai dengan yang menjadi tujuan program atau tidak.

Menurut Richard (2006:270) menyatakan efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan oleh organisasi. Sedangkan Pasolong (2007:4) menjelaskan bahwa pada dasarnya efektivitas berasal dari kata “efek”, dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab-akibat. Efektivitas dipandang sebagai suatu “sebab” dari variabel lain (Ana Rosaliana, 2019). Sedangkan Menurut Steers (1985:46) “Efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya untuk mencapai semua sasarannya” (Anisa Rahma Dini, 2019).

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tolak ukur yang menyatakan berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas suatu program perlu diukur agar dapat mengetahui berhasil tidaknya program yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui pengukuran efektivitas dapat menjadi pertimbangan mengenai lanjut atau tidak program tersebut.

### 2.1 Pengukuran Efektivitas

Efektivitas dari suatu program ataupun kegiatan yang dilakukan dilihat berdasarkan kesesuaian antara tujuan dan realisasi program yang dilaksanakan.

Untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan menggunakan berbagai indikator berdasarkan konsep dan teori yang ada. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tergantung dari pada siapa yang menilai dan menafsirkannya.

Menurut Steers yang ditulis oleh Anisa Rahma Dini dalam skripsinya (2019: 17-18) menjelaskan bahwa terdapat 3 indikator dalam pengukuran efektivitas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti jangka waktu yang dibutuhkan. Pencapaian tujuan ini terdiri dari 3 indikator yaitu, kurun waktu, sasaran dan dasar hukum yang merupakan target 18 kongkret dalam mencapai efektivitas suatu program atau kegiatan sebab efektivitas sebuah program dapat dilihat dari hasil akhir program.

2) Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk dapat mengadakan sosialisasi, komunikasi dan sebagai pengembangan konsensus. Akan tetapi pada intinya, integrasi lebih menekankan kepada proses sosialisasi. Sosialisasi merupakan penyampaian informasi mengenai suatu program atau organisasi kegiatan agar program atau organisasi kegiatan yang akan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan program atau organisasi kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam hal ini dapat berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program yang telah ditentukan dengan penerapannya di lasembako dan sarana-prasarana yang memadai.

Selanjutnya Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- 1) Keberhasilan program;
- 2) Keberhasilan sasaran;
- 3) Kepuasan terhadap program;
- 4) Tingkat input dan output;
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Menurut Makmur (Ana Rosalina, 2019) mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Ketepatan penentuan waktu Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;
- 2) Ketepatan dalam menentukan pilihan Ketepatan dalam menentukan pilihan adalah ketepatan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda dan lain sebagainya;
- 3) Ketepatan dalam menentukan tujuan Suatu organisasi akan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang



sifatnya lebih stratejik, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi;

- 4) Ketepatan ketepatan sasaran Sejalan dengan apa yang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya stratejik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional.

Dari keempat kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu program atau kegiatan dapat melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal sehingga tercapainya semua target, sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

### 2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Menurut Steers (Dini, 2019) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yaitu:

#### 1. Karakteristik Organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi (seperti inovasi program dan sebagainya), ukuran (seperti produktivitas,kepuasan kerja dan sebagainya), sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi (seperti pelayanan,efisiensi dalam operasi, pengejaran tujuan dan sebagainya). Teknologi juga dapat berakibat atas tingkat efektivitas selanjutnya, walaupun mungkin tidak langsung. Bukti-bukti

menunjukkan bahwa variasi teknologi berinteraksi dengan struktur dalam pengaruhnya terhadap efektivitas organisasi.

## 2. Karakteristik Lingkungan

Pengaruh lingkungan dapat dilihat dari dua segi. Pertama, lingkungan luar, yang umumnya menggambarkan kekuatan yang berada diluar organisasi (misalnya kondisi ekonomi, dan seterusnya). Kedua, lingkungan dalam, yaitu faktor-faktor di dalam organisasi yang menciptakan kultural dan sosial tempat berlangsungnya kegiatan kearah tujuan atau bisa disebut “Iklim organisasi”.

## 3. Karakteristik Pekerja

Faktor pengaruh yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu sendiri. Para pekerja merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektivitas karena perilaku mereka yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangai tercapainya tujuan. Kesadaran akan sifat perbedaan pribadi yang terdapat diantara para pekerja sangat penting dalam mencapai usaha yang diarahkan ke tujuan.

## 4. Karakteristik Praktek dan Kebijakan Manajemen

Terdapat beberapa mekanisme dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, adaptasi dan inovasi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3 Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT)

Program Sosial Non Tunai (BSNT) adalah bantuan sosial berupa sembako yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti program Rastra (Beras Sejahtera) yang disalurkan secara non tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, yang hanya digunakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras dan telur. Pencairan dana bantuan sosial dapat dilakukan di Elektronik Warung atau agen yang telah bekerja sama dengan pihak Bank Negara.

BSNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial berupa sembako tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial, maka program BSNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sosial berupa Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.200.000/KPM/ bulan. Selain itu, program Sosial berupa Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BSNT. Hal ini sebagai upaya dari Pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Garis Kemiskinan Makanan (KPM) memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan Garis Kemiskinan (GK).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Selain itu, stabilitas harga sembako mempengaruhi penurunan angka kemiskinan.

Adanya program BSNT akan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar masyarakat miskin terpenuhi. Di sisi lain, pengembangan jenis bahan sembako yang didapatkan dari program ini akan mampu meningkatkan nutrisi/gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan kekurangan gizi (stunting).

### 2.3.1 Dasar Hukum Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT)

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

**2.3.2 Tujuan dari Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT)**

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM BSNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan Sosial
2. Memberikan bahan Sosial dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM BSNT
3. Memberikan bahan Sosial dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi dan
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BSNT dalam memenuhi kebutuhan Sosial.

**2.3.3 Manfaat Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT)**

1. Meningkatkan ketahanan Sosial ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial
3. Meningkatkan transaksi nontunai untuk mendukung Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) dan
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah terutama usaha mikro dan kecil dibidang usaha penjualan beras atau telur.



### 2.3.4 Kriteria Penerima Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT)

Penerima Manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial.

DPM program Sembako bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Sembako (BSP). DPM program Sembako yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sembako Non tunai pasal 5 disebutkan kriteria penerima manfaat yakni:

- 1) Peserta BSNT dipersyaratkan sebagai KPM yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
- 2) KPM BSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

Kepesertaan KPM di dalam Program Sembako dapat berganti karena: (a) meninggal dan merupakan calon KPM beranggota tunggal/tidak ada anggota keluarga lain; (b) merupakan calon KPM yang seluruh anggotanya pindah ke

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



desa/kelurahan lain; (c) calon KPM menolak/mengundurkan diri sebagai KPM; (d) calon KPM tercatat ganda (dua kali atau lebih); dan (e) calon KPM sudah mampu.

### 2.3.5 Prinsip Pelaksanaan Program

1. Mudah dijangkau dan di gunakan oleh KPM.
2. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM.
3. Mendorong usaha eceran rakyat.
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM.
5. Warung Elektronik atau agen penyedia bahan Sosial dapat membeli pasokan bahan Sosial dari berbagai sumber.
6. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana kepada rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan Sosial kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan sembako.

### 2.3.6 Mekanisme dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) di Tahap Persiapan

1. Data BSNT Kabupaten/Kota beserta Daftar KPM BSNT ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
2. Daftar KPM BSNT disampaikan oleh Kementerian Sosial kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
3. Penyiapan warung (penyalur BSNT) oleh bank dilakukan dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Umum BSNT, antara lain memenuhi rasio 1:250 (satu agen mampu melayani

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitar 250 KPM) dan di setiap desa/kelurahan setidaknya tersedia dua warung. Tahap Sosialisasi dan Edukasi.

4. Sosialisasi dan edukasi BSNT dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya KPM mengenai tujuan dan mekanisme pemanfaatan BSNT serta saluran pengaduannya.
5. Sosialisasi dan edukasi BSNT juga diberikan kepada e-warung agar mampu melayani pemanfaatan BSNT. warung, sebagai tempat pembelian bahan sembako oleh KPM, dipasang stiker logo khusus sebagai penanda bagi KPM.
6. Pelaksana sosialisasi dan edukasi BSNT adalah Tim Koordinasi Bansos Sembako Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial, aparat daerah, serta Bank Penyalur.
7. Instrumen sosialisasi dan edukasi menggunakan berbagai media seperti: rapat koordinasi, pedoman umum dan petunjuk teknis, surat edaran dari kementerian/lembaga negara terkait, dan poster/brosur.
8. Sasaran edukasi dan sosialisasi BSNT adalah Tim Koordinasi Bansos Sembako Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial Bansos Sembako, aparat desa, KPM, dan warung. Tahap Registrasi/Distribusi KKS
9. Bank Penyalur melakukan registrasi atau pembukaan rekening secara kolektif berdasarkan data KPM yang diberikan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial
10. Bank Penyalur dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pendamping Sosial melaksanakan distribusi KKS dan kelengkapannya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada KPM yang telah dibukakan rekeningnya. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada KPM.

11. KPM mendapatkan pemberitahuan terkait kepesertaannya dalam program BSNT dan terkait proses registrasi/distribusi KKS.
12. Pada proses registrasi/distribusi KKS, calon KPM membawa kartu/dokumen identitas diri untuk dilakukan pencocokan dokumen sebelum KKS dibagikan.
13. Saat registrasi, Bank Penyalur juga memberikan informasi kepada KPM mengenai lokasi e-warong yang dapat diakses dan meminta KPM untuk melakukan pengecekan saldo KKS di warong.
14. Dalam hal ditemukan data KPM yang tidak sesuai (berupa kesalahan penulisan nama, NIK atau alamat) pada saat pelaksanaan registrasi, maka KPM dimaksud harus menyertakan dokumen tambahan berupa surat keterangan dari desa/kelurahan setempat. Tahap Penyaluran BSNT Transfer manfaat BSNT dari Bank Penyalur ke rekening KPM BSNT dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

## 2.7 Tahap Pemanfaatan

1. KPM datang ke warong dengan membawa KKS dan kartu identitas diri.
2. KPM melakukan cek saldo bantuan yang tersedia pada KKS di mesin EDC dengan memasukkan kode rahasia (PIN) KKS dan akan menerima bukti transaksi pengecekan saldo dana pada KKS.
3. Jika saldo pada KKS mencukupi, KPM dapat melakukan pembelian bahan sembako (sesuai permintaan KPM) dengan memasukkan PIN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KKS pada mesin EDC bank.

4. Setelah transaksi berhasil, KPM dapat menerima bantuan sembako (seperti permintaan KPM) disertai bukti transaksi.
5. Saldo yang ada pada KKS KPM akan berkurang sesuai dengan nilai BSNT yang dibelanjakan.
6. Sisa jumlah dana yang belum digunakan akan tersimpan dalam KKS dan tidak dapat ditarik tunai serta hanya dapat dimanfaatkan untuk transaksi BSNT (pembelian beras dan/atau telur).

**2.3.8 Kartu Keluarga Sejahtera**

Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran dana bantuan program BSNT kepada KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan desain seperti di bawah ini.

**Gambar 2.1  
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)**



- 1) Untuk program BSNT, kartu KKS berfungsi sebagai alat transaksi, sehingga pada saat pemanfaatan bantuan wajib dibawa oleh KPM
- 2) KKS menyimpan nilai/besaran manfaat program BSNT. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program Sosial. Dana bantuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program Sosial tidak dapat dicairkan secara tunai

- 3) Pada KKS tertera nama Pengurus KPM, nomor KKS, nama Bank Penyalur, dan nomor telepon pengaduan
- 4) KKS dari Bank Penyalur dilengkapi dengan PIN (personal identification number), yaitu 6 (enam) angka yang digunakan untuk mengakses rekening pada saat transaksi.

### 2.3.9 Besaran Manfaat

Besaran manfaat program sosial berupa Sembako adalah Rp.200.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan sembako yang ditentukan untuk program Sembako di e-Warong.

### 2.3.10 Bahan Sembako

Bahan sembako yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dan bantuan program Sembako adalah:

- a. Sumber karbohidrat: beras atau bahan sembako lokal seperti jagung pipilan dan sagu.
- b. Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam, ikan.
- c. Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu.
- d. Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur, buah-buahan.

Bantuan program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, makanan kaleng, mie instan dan bahan sembako lainnya yang tidak termasuk dalam butir a-d di atas. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok. Program Sembako mengkomodir ketersediaan bahan sembako lokal.

## 2.4 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Ahmad, 2018)

Menurut BPS dalam Takaredase (Jurnal, 2019:3) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sembako maupun non sembako. BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar (Supiani,2020).

Sedangkan kemiskinan menurut Windia yang dikutip oleh Sopah dkk (Jurnal, 2020:29) dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, yakni: (i) kemiskinan absolut, (ii) kemiskinan relatif dan (iii) kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti: sembako, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Selanjutnya, seseorang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



tergolong miskin relatif apabila seseorang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan seseorang tergolong miskin kultural apabila seseorang atau sekelompok masyarakat tersebut memiliki sikap tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

### 2.4.1 Indikator Kemiskinan

Untuk mengetahui jumlah angka kemiskinan dapat digunakan lima versi indikator kemiskinan, sebagai berikut:

- 1) Versi Bank Dunia; kemiskinan diukur secara ekonomi berdasarkan penghasilan yang diperoleh orang miskin adalah mereka yang berpendapatan maksimal UU\$ 2 per hari
- 2) Versi International Labour Organization (ILO); Yaitu orang miskin di pedesaan jika pendapatan maksimal US\$ 0,8.
- 3) Versi BKKBN yang mendefinisikan kemiskinan dengan 5 indikator 1) Tidak dapat menjalankan ibadah menurut agamanya, 2) Seluruh keluarga tidak mampu makan dua kali sehari, 3) Seluruh anggota keluarga tidak mempunyai pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah dan berpergian, 4) Bagian terluas rumahnya terdiri atas tanah, 5) tidak mampu membawa keluarga jika sakit ke sarana kesehatan
- 4) Versi Dinas Kesehatan menambahkan kriteria tingkat akses pelayanan kesehatan pemerintah, ada anggota keluarga yang putus sekolah atau tidak, frekuensi makan makanan pokok per hari kurang dari dua kali dan kepala keluarga mengalami pemutusan hubungan kerja atau tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Versi BPS mendefinisikan miskin berdasarkan tingkat konsumsi makanan kurang dari 2100 kalori/kapita/per hari dan kebutuhan minimal non makanan (sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan). Disamping itu secara ekonomi BPS menetapkan penghasilan Rp. 175.324,- per bulan sebagai batas miskin perkotaan dan Rp. 131.256,- di pedesaan (Ahmad, 2018).

## 2.6 Kekurangan Gizi (Stunting)

### 2.6.1 Pengertian Gizi (Stunting)

Kekurangan gizi (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (Bagi bayi dibawah lima tahun) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi kekurangan gizi (stunting) baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. kekurangan gizi (stunting) yang dialami anak dapat disebabkan oleh tidak terpaparnya periode 1000 hari pertama kehidupan mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Kekurangan gizi (stunting) dapat pula disebabkan tidak melewati periode emas yang dimulai 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan pembentukan tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama. Pada masa tersebut nutrisi yang diterima bayi saat didalam kandungan dan menerima ASI memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan saat dewasa. Hal ini dapat terlampaui maka akan terhindar dari terjadinya kekurangan gizi (stunting) pada anak-anak dan status gizi yang kurang (Depkes, 2015). Balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi



#### Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study) tahun 2006. Kekurangan gizi (stunting) pada anak merupakan indikator status gizi yang dapat memberikan gambaran gangguan keadaan sosial ekonomi secara keseluruhan di masa lampau. Kekurangan gizi (stunting) merupakan istilah para nutrinis untuk penyebutan anak yang tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang semestinya (bayi pendek). Kekurangan gizi (stunting) (tubuh pendek) adalah keadaan tubuh yang sangat pendek hingga melampaui defisit dibawah median panjang atau tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional. kekurangan gizi (stunting) adalah keadaan dimana tinggi badan berdasarkan umur rendah, atau keadaan dimana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak – anak lain seusianya (MCN, 2009).

#### 2.5.2 Penyebab Kekurangan Gizi (stunting)

Pada masa ini merupakan proses terjadinya kekurangan gizi (stunting) pada anak dan peluang peningkatan kekurangan gizi (stunting) terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan janin mengalami intrauterine growth retardation (IUGR), sehingga bayi akan lahir dengan kurang gizi, dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang berulang, dan meningkatnya kebutuhan metabolik serta mengurangi nafsu makan, sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin



mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya kekurangan gizi (stunting) (Depkes, 2011). Gizi buruk kronis (stunting) tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja seperti yang telah dijelaskan diatas, tetapi disebabkan oleh banyak faktor, dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Terdapat tiga faktor utama penyebab kekurangan gizi (stunting) yaitu asupan makanan tidak seimbang (berkaitan dengan kandungan zat gizi dalam makanan yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air), riwayat berat badan lahir rendah (BBLR), riwayat penyakit, praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).

### 2.5.3 Dampak Kekurangan Gizi (stunting)

Kekurangan gizi (stunting) dapat mengakibatkan penurunan intelegensia (IQ), sehingga prestasi belajar menjadi rendah dan tidak dapat melanjutkan sekolah. Anak yang menderita kekurangan gizi (stunting) berdampak tidak hanya pada fisik yang lebih pendek saja, tetapi juga pada kecerdasan, produktivitas dan prestasinya kelak setelah dewasa, sehingga akan menjadi beban negara. Selain itu dari aspek estetika, seseorang yang tumbuh proporsional akan kelihatan lebih menarik dari yang tubuhnya. Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurang gizi pada masa-masa emas ini akan berakibat buruk pada kehidupan berikutnya dan sulit diperbaiki. Masalah kekurangan gizi (stunting) menunjukkan ketidakcukupan gizi dalam jangka waktu panjang yaitu kurang energi dan protein, juga beberapa zat gizi mikro.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 2.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Kekurangan Gizi (stunting)

Beberapa faktor yang terkait dengan kejadian kekurangan gizi (stunting) berhubungan dengan berbagai macam faktor yaitu faktor karakteristik orangtua yaitu pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pola asuh, pola makan dan jumlah anggota dalam keluarga, faktor genetik, penyakit infeksi, kejadian BBLR, kekurangan energi dan protein, sering mengalami penyakit kronis, praktek pemberian makan yang tidak sesuai. Adapun faktor resiko kekurangan gizi (stunting) yaitu :

##### a. Pendidikan Orang Tua

Menurut George F. Kneller yang dikutip oleh Siswoyo dkk (2007) pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan teknis. Dalam arti luas pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa, watak, atau kemampuan fisik individu. Dalam arti teknis, pendidikan adalah proses dimana masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau lembaga lainnya) dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai keterampilan-keterampilan, dan generasi-generasi. Pendidikan menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan formal adalah pendidikan yang berlangsung

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

secara teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat tertentu secara ketat. Pendidikan ini berlangsung di sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan informal adalah pendidikan yang didapatkan seseorang dari pengalaman sehari-hari baik secara sadar maupun tidak sadar sepanjang hayat. Pendidikan ini dapat berlangsung dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam pekerjaan, masyarakat, dan organisasi. Pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara tertentu dan sadar tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang ketat. Tingkat pendidikan merupakan suatu proses yang sengaja dilakukan oleh orangtua siswa TK Islam Zahrotul Ulum untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuannya melalui pendidikan formal yang berjenjang. Tingkat pendidikan mempengaruhi pola konsumsi makan melalui cara pemilihan bahan makanan dalam hal kualitas dan kuantitas. Pendidikan orang tua terutama ayah memiliki hubungan timbal balik dengan pekerjaan. Pendidikan ayah merupakan faktor yang mempengaruhi harta rumah tangga dan komoditi pasar yang dikonsumsi karena dapat mempengaruhi sikap dan kecenderungan dalam memilih bahan-bahan konsumsi. Sedangkan pendidikan ibu mempengaruhi status gizi anak, dimana semakin tinggi pendidikan ibu maka akan semakin baik pula status gizi anak. Tingkat pendidikan juga berkaitan dengan pengetahuan gizi yang dimiliki, dimana semakin tinggi pendidikan ibu maka semakin baik pula pemahaman dalam memilih bahan makanan.

b. Pekerjaan Orang Tua

Pekerjaan orangtua mempunyai andil yang besar dalam masalah gizi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekerjaan orangtua berkaitan erat dengan penghasilan keluarga yang mempengaruhi daya beli keluarga. Keluarga dengan pendapatan yang terbatas, besar kemungkinan kurang dapat memenuhi kebutuhan makanannya secara kualitas dan kuantitas. Peningkatan pendapatan keluarga dapat berpengaruh pada susunan makanan. Pengeluaran yang lebih banyak untuk sembako tidak menjamin lebih beragamnya konsumsi sembako seseorang. Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak, karena orangtua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer maupun sekunder (Soetjiningsih, 2000).

c. Tinggi badan orangtua

Tinggi badan adalah jarak dari puncak kepala hingga telapak kaki. Parameter ini merupakan parameter yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal dan tidak sensitif untuk mendeteksi permasalahan gizi pada waktu yang singkat. Pengukuran tinggi badan sebagai parameter tinggi badan mempunyai banyak kegunaan, yaitu dalam penilaian status gizi, penentuan kebutuhan energi basal, penghitungan dosis obat, dan prediksi dari fungsi fisiologis seperti volume paru, kekuatan otot, dan kecepatan filtrasi glomerulus. Tinggi badan dapat diukur dari alas kaki ke titik tertinggi pada posisi tegak. Menurut Wibowo Adi (2008) berpendapat bahwa tinggi badan merupakan ukuran posisi tubuh berdiri (vertical) dengan kaki menempel pada lantai, posisi kepala dan leher tegak, pandangan rata-rata air, dada dibusungkan, perut datar dan tarik nafas beberapa saat. Menurut Wahyudi (2011) yang dikutip Catur baharudin (2007) berpendapat bahwa tinggi badan diukur dalam posisi berdiri sikap sempurna tanpa alas kaki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengukur tinggi badan seseorang pada posisi berdiri secara anatomis, dapat diukur dari kepala bagian atas sampai ketelapak kaki bagian bawah.

d. Status Gizi

Status gizi adalah keadaan tubuh yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis. Status gizi merupakan gambaran terhadap ketiga indikator, yakni berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) terjadi akibat faktor langsung dan tidak langsung, maka berdasarkan hasil riset tersebut menggunakan data sekunder (Depkes, 2011). Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa berat badan dan tinggi badan orang tua dengan status gizi, dimana hasil penelitian ini menjadi gambaran mengenai situasi gizi balita berdasarkan berat dan tinggi badan orang tua. Tinggi badan pada ibu bukan merupakan faktor risiko terhadap kejadian kekurangan gizi (stunting) . Tinggi badan merupakan salah satu bentuk dari ekspresi genetik, dan merupakan faktor yang diturunkan kepada anak serta berkaitan dengan kejadian kekurangan gizi (stunting) . Menurut Soeharjo dan Riyadi (2009) status gizi adalah tanda-tanda atau penampilan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara pemasukan gizi disatu pihak dan pengeluaran energi dipihak lain yang terlihat melalui indikator berat badan dan tinggi badan. Menurut Dahono (2011) gambaran gizi adalah keadaan kesehatan seseorang sebagai gambaran konsumsi zat makanan yang dimasukan ke dalam tubuh. Menurut Arisman (2012) penelitian status gizi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada dasarnya merupakan proses pemeriksaan keadaan gizi seseorang dengan cara mengumpulkan data penting baik yang bersifat objektif maupun subjektif, untuk dibandingkan dengan buku yang telah tersedia. Komponen penilaian status gizi diperoleh melalui asupan makanan, pemeriksaan biokimiawi, pemeriksaan klinis, dan riwayat mengenai kesehatan, antropometrik, serta data psikososial. Pengukuran status gizi berdasarkan kriteria antropometri merupakan cara yang dianggap paling sering digunakan karena mempunyai kelebihan-kelebihan antara lain cara yang paling mudah dan praktis dilakukan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa status gizi adalah suatu keadaan seseorang sebagai akibat dari mengkonsumsi dan proses terhadap makanan dalam tubuh dan kesesuaian gizi yang dikonsumsi dengan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Keadaan kesehatan anak sebagai gambaran konsumsi zat makanan yang masuk keadaan tubuh dan penggunaannya, sebagai hasil ini dapat diketahui dari tinggi badan dan berat badan anak, yang merupakan indikator terbaik bagi penentuan status gizi. Anak dengan orang tua yang pendek, baik salah satu maupun keduanya, lebih berisiko untuk tumbuh pendek dibanding anak dengan orang tua yang tinggi badannya normal (Supariasa, 2005). Orang tua yang pendek karena gen dalam kromosom yang membawa sifat pendek kemungkinan besar akan menurunkan sifat pendek tersebut kepada anaknya. Tetapi bila sifat pendek orang tua disebabkan karena masalah nutrisi maupun patologis, maka sifat pendek tersebut tidak akan diturunkan kepada anaknya. Penelitian Schmidt et al. (2002) di Jawa Barat menyimpulkan bahwa setiap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenaikan 1 cm tinggi badan ibu, makapanjang badan bayi bertambah 0.196 cm (p value 0,04). Banyak faktor yang mempengaruhi kekurangan gizi (stunting), diantaranya adalah panjang badan lahir, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan tinggi badan orang tua. Panjang badan lahir pendek bisa disebabkan oleh faktor genetik yaitu tinggi badan orang tua yang pendek, maupun karena kurangnya pemenuhan zat gizi pada masa kehamilan (Yupi, 2004). Akan tetapi walaupun anak terlahir dari orangtua yang pendek tetapi selama anak tersebut mendapatkan asupan yang memadai dan terjaga kesehatannya, maka kondisi panjang badan lahir yang pendek dapat dikejar dengan pertumbuhan seiring bertambahnya usia anak (WHO, 2006).

## 2.6 Pandangan Islam tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Miskin)

Konsep islam tentang jaminan sosial berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang menyuruh kaum muslimin menolong saudara seagama mereka yang fakir dan miskin, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sebagaimana dalam surat Al Hasyr : 7 sebagai berikut:

أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
 كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"Apa saja harta rampasan (fai'i) yang diberikan Allah kepada rasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnyallah sangat*



*keras hukuman-Nya.” (Q.S Al-Hasyr: 7).*

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa negara, dalam kedudukannya sebagai wali bagi kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan, bertanggungjawab menyediakan kebutuhan paling dasar bagi warga negaranya yang fakir dan miskin. Di dalam penerimaan negara yang berasal dari fai’ (harta rampasan), Al-Quran telah dengan khusus menyebutkan bagian kaum fakir dan miskin itu, selain itu negara bertanggung jawab mencukupi kaum miskin, Islam juga menyuruh para pemeluknya yang kaya untuk menolong kerabat, kawan dan tetangga mereka yang miskin.

Setiap orang yang hidup dalam negara berhak mendapatkan kebutuhan dasarnya. Jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar itu baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya karena menganggur, sakit, cacat, usia tua atau yang lainnya, maka negara wajib mencukupi kebutuhan dasarnya yang dibutuhkannya. Jika negara itu tidak memiliki sumber yang cukup, maka negara harus menentukan cara untuk menolong warganya yang memerlukan itu.

Islam sebagai agama kemanusiaan yang bersifat universal, mempercayai adanya kesuksesan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. Ia mengarahkan pemeluknya untuk mencapai kesejahteraan materiil maupun spiritual. Di dalam salah satu doa yang amat populer, Al-Qur’an mengajarkan kaum Mukminin untuk berdoa:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. Al-Baqarah (2): 201).*

Oleh karena itu, tujuan primer sebuah negara Islam adalah menegakkan sebuah masyarakat ideal yang di dasarkan pada keadilan, persamaan, dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan. Negara Islam tidak hanya menegakkan sistem penyembahan kepada Allah (yakni shalat atau sembahyang) melainkan juga menegakkan sistem zakat. Dengan demikian, baik kesejahteraan spiritual maupun material setiap individu sama-sama dituju oleh negara Islam.

Dalam agama islam, negara haruslah mementingkan kesejahteraan umat. Dimana negara sebagai pemegang kekuasaan berkewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup warga negaranya. Kewajiban negara ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah.

Menurut Ibu Taimiyah yang dikutip oleh Prichatin dalam skripsinya (2019: 40) melalui kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dapat mencapai kemakmuran yang diantaranya adalah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Dimana untuk mengatasi pengangguran pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal dan apabila pengangguran berkurang maka secara otomatis kemiskinan akan ikut terentaskan sedikit demi sedikit.

Dalam pandangan Islam tentang kemiskinan yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang dikategorikan sebagai kelompok mampu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata miskin diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan dan berpenghasilan rendah. Sedangkan fakir diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan, atau sangat miskin. Namun dalam bahasa aslinya (Arab) kata miskin diambil dari kata sakana yang berarti diam atau tenang, sedang faqir dari kata faqr yang pada mulanya berarti tulang punggung. Faqir adalah orang yang patah tulang punggungnya dalam arti bahwa beban yang dibikulnya sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Prichatin, Skripsi, 2019:40).

Salah satu konsep untuk memberantas kemiskinan adalah dengan berusaha dan bekerja keras. Dalam Islam bekerja untuk mencari rizki merupakan perbuatan yang mulia walaupun pekerjaan tersebut terlihat remeh atau hina. Nabi sendiri menegaskan bahwa orang yang bekerja dengan mencari kayu bakar kemudian dijual lebih baik daripada orang yang meminta-minta, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW:

*“Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh apabila salah seorang diantara kalian mengambil seutas tali kemudian mencari kayu dan dia bawa kayu itu di atas punggungnya, niscaya hal itu lebih baik dari keadaan orang yang meminta-minta, yang mungkin saja ia akan diberi atau tidak diberi”.* (HR. Bukhari: 1377).

## 2.7 Kajian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Ahda Sulikin Nisa (2019)	Analisis Program Bantuan Sembako Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam	Implementasi program BPNT ini belum dapat memenuhi indikator. Yang hanya dapat dipenuhi hanyalah indikator tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat guna. Berdasarkan implementasi program BPNT didesa merak bathin bahwa Program BPNT ini hanya merupakan fungsi kesejahteraan	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahda Sulikin yaitu dengan melihat pada Program Bantuan Sembako Non Tunai (BPNT) dengan melihat pada Analisisnya dengan pelaksanaan dengan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>kebutuhan sembako saja yaitu hanya mengurangi beban pengeluaran kebutuhan sembako saja.</p>	<p>pembahasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dalam perspektif islam, Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) yang dilihat dari segi Efektivitasnya dengan menekan angka kekurangan gizi (stunting) .</p>
<p>2. <b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b></p>	<p>Anisa Rahma Dini, Yunisca Nurmalisa, Abdul Halim (Jurnal fkip unila Vol. 5 No. 13)</p>	<p>Efektivitas Program Bantuan Sembako Non Tunia Dalam Mengurangi Tingkat Pengeluaran Sembako Rumah Tangga di Kelurahan 3 - 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sembako Non Tunai di Kelurahan Gulak Galik Pelaksnanya Sudah berjalan Efektif dan hanya perlu ditingkatkan pada Indikator yang masih termasuk kategori cukup efektif.</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahma, dkk yaitu dengan melihat Program BPNT pada pelaksanaan pengurangan tingkat pengeluaran sembako rumah tangga di Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan seberang Ulu 1 Kota Palembang.</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik</p>				<p>Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas BSNT pada pengurangan angka stunting di Desa Muara Basung Duri</p>
<p>UIN Suska Riau</p>	<p>Ana Rosaliana, Susi Hardjati (2019)</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sembako Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya</p>	<p>Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Wonocolo sejauh ini telah terlaksana secara tepat waktu, baik penyaluran dana bantuan sembako dari pemerintah ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), maupun penyaluran dana bantuan operasional e-warong dari pemerintah ke pengelola e-warong. Selain dari segi waktu, efektivitas program BPNT dilihat dari sisi ketepatan pilihan. Dalam penentuan calon penerima BPNT Pemerintah memiliki beragam kriteria supaya pemberian bantuan tepat sasaran. Namun dari hasil temuan di lasembako teridentifikasi</p>	<p>Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ana Rosalina dan Susi Hardjati yaitu dengan melihat pada Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sembako NoN Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Sedangkan penulis dalam penelitian ini melihat pada efektifitas BSNT dengan pembahasan mengurangi angka stunting di Desa Muara Basung</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau			kurangnya pembaharuan informasi data, menyebabkan penerima BPNT yang masih belum memenuhi kriteria. Dalam hal pemanfaatan pilihan kebutuhan yang terbatas pada beras dan telur tersebut, pada dasarnya sebagian besar KPM menerima dengan baik apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah.	
----------------------------------	--	--	---	--

## 2.8 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social (Masri Singarimbun 2006: 33). Maka defenisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam artian luas, dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1981), adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (whatever governments choose to do or not to do). Kalimat ini mengandung makna bahwa apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilakukan oleh badan/instansi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan (Subianto: 3).

## 2. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah tolak ukur yang menyatakan berhasil tidaknya suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas suatu program perlu diukur agar dapat mengetahui berhasil tidaknya program yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui pengukuran efektivitas dapat menjadi pertimbangan mengenai lanjut atau tidak program tersebut.

## 3. Program Sosial Non Tunai (BSNT)

BSNT adalah bantuan sosial Sosial yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti program Rastra (Beras Sejahtera) yang disalurkan secara non tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, yang hanya digunakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras dan telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

## 4. Konsep Kemiskinan

Menurut BPS dalam Takaredase (Jurnal, 2019:3) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sembako maupun non sembako. BPS menghitung angka kemiskinan lewat tingkat konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar (basic needs). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

5. Kekurangan Gizi (Stunting)

Kekurangan gizi (stunting) merupakan kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir ini disebabkan karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman sembako dan sumber protein hewani.

**2.9 Kerangka Pemikiran**

Menurut Uma Sekaran (Sugiono, 2007) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah:

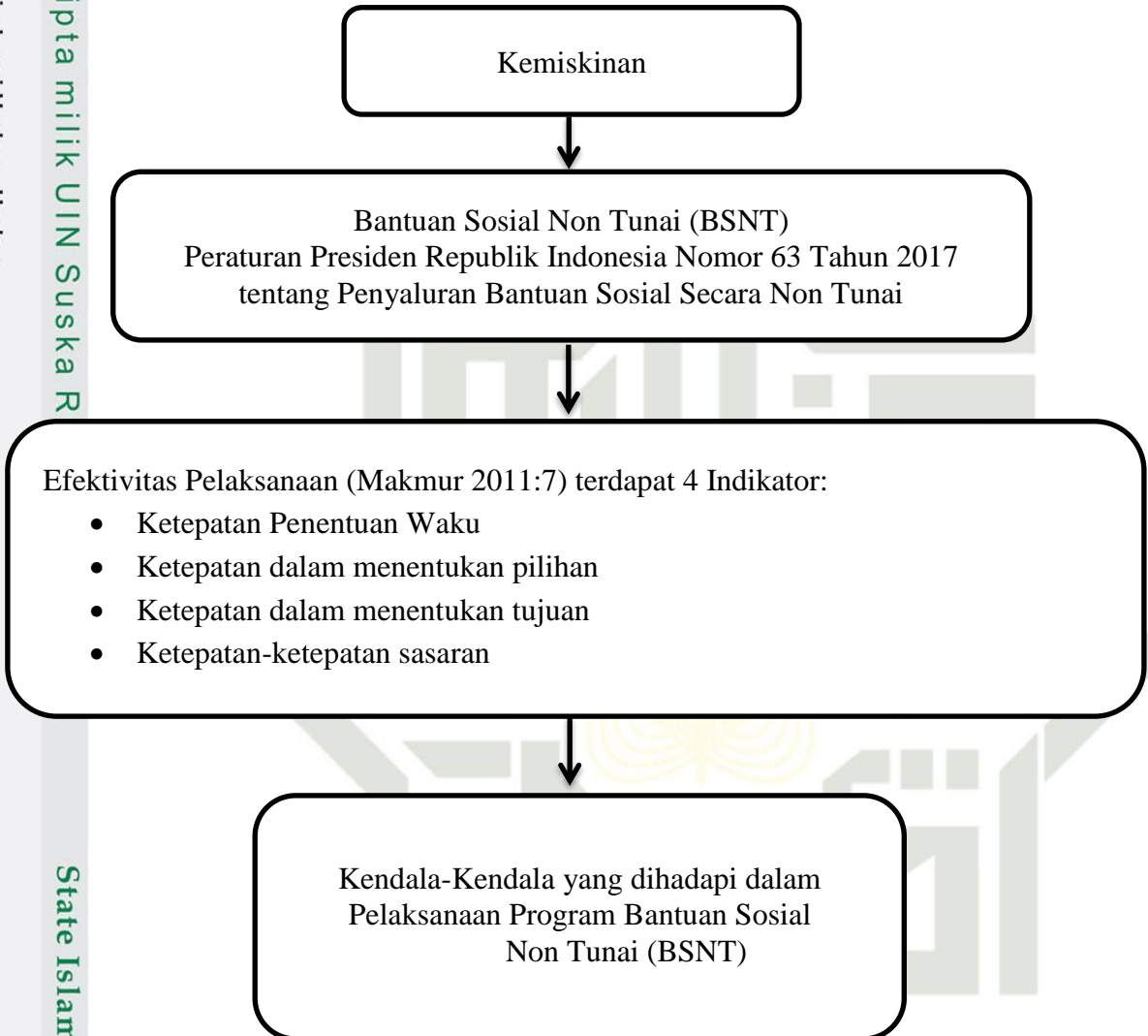


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.2**

**Karangka Pemikiran**



## 2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memeberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut. Konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman terhadap Konsep Indikator.

**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Makmur (2011:7)	1. Ketepatan Penentuan Waktu	a. Kesesuaian jadwal penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) dilasembako dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya; b. Kesesuaian jadwal penyaluran dana BSNT yang berupa bantuan operasional e-warong;
	2. Ketepatan dalam menentukan pilihan	a. Ketepatan memilih penerima program BSNT berdasarkan syarat-syarat yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang penyaluran dana bantuan BSNT; b. Ketepatan atau kesesuaian bantuan sembako yang diberikan kepada KPM
	3. Ketepatan dalam menentukan tujuan	a. Ketepatan usaha atau langkah-langkah strategik yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait upaya pencapaian tujuan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>		<p>program BSNT.</p> <p>b. Ketepatan dalam melaksanakan tujuan BSNT yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018.</p>
	<p>4. Ketepatan-ketepatan sasaran</p>	<p>a. Ketepatan dalam pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai alat pembayaran elektronik BSNT</p>

Sumber: Rosalina, A. & Hardjati, S.(2019), Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sembako Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, *Public Administration Journal*, 2(2),96-110

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di daerah yang dipilih atau ditetapkan sebagai penerima Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT). Lokasi penelitian ini berada di Desa Muara Basung Duri. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena Desa tersebut masih banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari Desember 2020 sampai dengan selesai

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam membuat penelitian ini berupa penelitian jenis Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini mengarah pada subjek yang akan diteliti dengan menggunakan data yang telah banyak dikumpulkan dengan telah melakukan penganalisisan terlebih dahulu secara lebih mendalam dalam melakukan suatu penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan proposal. Penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan gambaran mengenai analisis tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai dalam mengurangi angka kekurangan gizi (stunting) yang berada di Kota duri Tahun 2021. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan penelitian yang baik secara benar yang tidak akan memihak pada siapapun termasuk pada kekuasaan dan dikembangkan berdasarkan etika dan moral serta norma-norma yang telah ada. Selanjutnya dalam hal ini sumber data yang diperlukan adalah :

1. Data Primer

Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian, yaitu observasi berupa pendapat informan tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai berbasis komunikasi serta hasil wawancara dengan informan untuk memperjelas hasil dari observasi tersebut.

2. Data Sekunder

Istijanto (2006:27) mengatakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Yaitu data yang diperoleh dari Tim BSNT di Desa Muara Basung Duri, Kepala Desa Muara Basung, Sekretaris Desa Muara Basung.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:188-198) sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai yang mengetahui pasti masalah pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai di Desa Muara Basung Duri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (Moleong, 2005:217).

**3.4 Informan Penelitian**

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dengan teknik penentuan Informan dengan memakai teknik Key Informan. Key Informan yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai di Desa Muara Basung Duri. Peneliti menggunakan teknik triangulasi yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

**Tabel. 3.1**  
**Key Informan Peneliti**

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Akhyar Mukmin	Kepala Desa Muara Basung	1
2.	Rati Gusmayani S.IP	Fasilitator BSNT Desa Muara Basung Duri	1
3.	Yensi	Agen E-Waroeng	1
4.	Masyarakat	Penerima Program BSNT	10

Sumber: Data Kantor Desa Muara Basung Duri Tahun 2021



### 35 Hak Cipta dan Hak Akademik UIN Suska Riau

Merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan – ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik analisis data kualitatif deskriptif. (Sugiyono, 2014:60). Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014 : 246-252) yaitu :

#### 1. Reduksi data Mereduksi data

Merupakan proses merangkum, memilih hal – hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal – hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lasembako. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

#### 2. Penyajian data Penyajian data dalam penelitian kualitatif

Adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lasembako yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajiikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Desa Muara Basung

##### 4.1.1 Sejarah Desa Muara Basung

Desa Muara Basung adalah desa yang terletak di Kecamatan Pinggir sebuah kecamatan yang berada di daratan Pulau Sumatra yang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bengkalis. Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis berdiri pada tahun 1951 pada awalnya sebelum menjadi nama Muara Basung terdiri dua kelompok asli suku sakai, yang pertama suku batin Beringin Sakai yang kedua Suku Batin Sakai Panaso Daratan. Pada saat itu berada di daerah suluk bongkal yang jaraknya dari jalan lintas sekarang  $\pm$  40 Km. Pada saat itu masih hutan lebat, pada tahun 1951 ada program dari Departemen Sosial Provinsi Riau untuk membina masyarakat suku sakai, oleh Kepala Departemen Sosial Provinsi Riau (H. Karim Said) dan Camat Mandau (Bukhori) beserta seorang petugas Pembina (Soetarmo). Masyarakat suku sakai dua kelompok tersebut dikumpulkan menjadi satu dipinggir jalan lintas maka dinamakanlah daerah baru tersebut Kampung Muara Basung, diberi nama Muara Basung karena disekitar pemukiman Baru tersebut ditumbuhi kayu yang namanya Muara Basung. Dengan Luas Wilayah 8.741 Ha, jumlah penduduk  $\pm$  11.207 Jiwa.

Desa Muara Basung merupakan salah satu Desa terbesar dikecamatan Pinggir yang memiliki Penduduk yang padat, dengan 5 Dusun Yaitu : Dusun I Sempang, Dusun II Sialang Rimbun, Dusun III Sialang Muda, Dusun IV Sako Jaya, Dusun V Bunta Jaya , dan 38 Rukun Tetangga ( RT ) dan 10 Rukun Warga ( RW ) dan, yang sebagian besar  $\pm$  98 % menganut agama islam dari rumpun





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melayu, minang, jawa, batak Kristen / Khatolik. Mata pencaharian berkebun dan latar belakang pendidikan masyarakat rata-rata tamatan SLTP – SLTA sederajat dengan kondisi keamanan dan ketertiban terbina dan kondusif.

Pusat Pemerintahan Desa Muara Basung berada di Jl. Bathin Tarak No.09 RT.03/RW.01 Dusun I Simpang Desa Muara Basung dan 7 Km dari Pusat Kecamatan Pinggir. 220 Km dari pusat Kabupaten, 100 Km dari Pusat Provinsi. Selama terbentuknya Pemerintah Desa Muara Basung semenjak Tahun 1951 sampai sekarang sudah berganti Kepala Desa Sebanyak 10 ( Sepuluh ) Orang yaitu :

1. KITUM : Tahun 1961 S/d 1965
2. AMIR TIGO : Tahun 1965 S/d 1977
3. MUHAMMAD NUR : Tahun 1977 S/d 1990
4. ZAINUDDIN : Tahun 1990 S/d 1991 ( PJS )
5. RUSLAN : Tahun 1991 S/d 1992 ( PJS )
6. ABINUHAJAR : Tahun 1992 S/d 1998
7. BUDIMAN RUSLAN : Tahun 1998 S/d 2000 ( PJS )
8. AMRIL MUKMININ, SE : Tahun 2000 S/d 2004
9. AL – AZMI : Tahun 2004 S/d 2017
10. Z A K I R : Tahun 2017 S/d 2018 (PJS)
11. AKHYAR MUKMIN : Tahun 2019 s/d saat ini

**4.2 Demografi**

**A. Batas Wilayah**

Letak Geografi Desa Muara Basung terletak diantara :

Sebelah utara : Berbatas dengan Desa Semunai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Desa Tenganau dan Desa Kuala Penaso

Sebelah timur : Berbatas dengan Desa Tasik Serai/Koto Pait

Sebelah Barat : Berbatas dengan Desa Tenganau

**B. Jumlah Penduduk**

1. Laki-laki : 6075 Orang
2. Perempuan : 5126 Orang
3. Jumlah Total : 11.210 Orang
4. Jumlah KK : 2769 KK

**C. Orbitasi**

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 7 KM
2. Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 215 KM
3. Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 100 KM
4. Waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 1 Jam
5. Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 3 Jam
6. Waktu tempuh ke Ibu Kota Provinsi : 4 Jam

**4.1.3 Keadaan Sosial**

**A. Pendidikan**

1. TK : 778 Orang
2. SD/Sederajat : 63 Orang
3. SMP/Sederajat : 56 Orang
4. SMA/Sederajat : 1.450 Orang

**B. Lembaga Pendidikan**

1. TK : 3 Unit

2. SD/Sederajat : 3 Unit
3. SMP/Sederajat : 2 Unit
4. SMA/Sederajat : 2 Unit

### C. Agama

1. Islam : 4.510 Orang
2. Kristen : 1.731 Orang

### 4.1.4 Keadaan Ekonomi

#### A. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Buruh Tani : 1.500 Orang
2. PNS : 145 Orang
3. Pedagang : 623 Orang
4. Guru : 849 Orang
5. Akuntan : 35 Orang

### 4.1.5 Kondisi Pemerintahan Desa

#### A. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

##### 1. Lembaga Pemerintahan Desa

**Tabel 4.1 Data Lembaga Pemerintahan Desa Muara Basung**

No.	Aparatur Kelurahan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Desa Muara Basung	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Bendahara Desa	1 Orang
4.	Staf Administrasi	1 Orang
5.	Staf Pembantu Sekretariat	1 Orang
6.	Kaur umum	1 Orang
7.	Kaur Keuangan	1 Orang
8.	Kaur Pemerintahan	1 Orang
9.	Kaur Pembangunan	1 Orang
10.	Kaur Kesra	1 Orang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



11.	Kadis I	1 Orang
12.	Kadis II	1 Orang
13.	Kadis III	1 Orang
14.	Kadis IV	1 Orang
15.	Kadis V	1 Orang

Sumber : Kantor Desa Muara Basung Duri Tahun 2021

## 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 9 Orang

## 3. Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 4.2 Data Lembaga Kemasyarakatan

No.	Lembaga Kemasyarakatan	Kelompok
1.	LPMD	1 Kelompok
2.	PKK	1 Kelompok
3.	Posyandu	8 Kelompok
4.	Pos Kamling	6 Kelompok
5.	Puskesmas	1 Kelompok
6.	Simpan Pinjam	-
7.	Masjid	10 Kelompok
8.	Karang Taruna	-
9.	BUMDES	1 Kelompok
10.	Ormas/LSM	-
11.	Arisan Masyarakat	-
12.	Lain-lain	-

Sumber : Kantor Desa Muara Basung Duri Tahun 2021

## B. Tugas Fungsi dan Pokok

Tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 84 Tahun 2015

### 1. Kepala Desa

- a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

## 2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa (Mudes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah :

1. Menyalurkan Aspirasi
2. Merencanakan APBDes

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Mengawasi Pemerintahan Desa

#### 3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

- a. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi.
  4. keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  5. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

- a. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
  1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi penyusunan program dan kebijakan pemerintahan desa dalam rangka pembangunan desa, penyusunan program dan rencana kegiatan pembangunan, penyusunan data dan bahan laporan pelaksanaan pembangunan.

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

- a. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- b. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  1. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  2. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

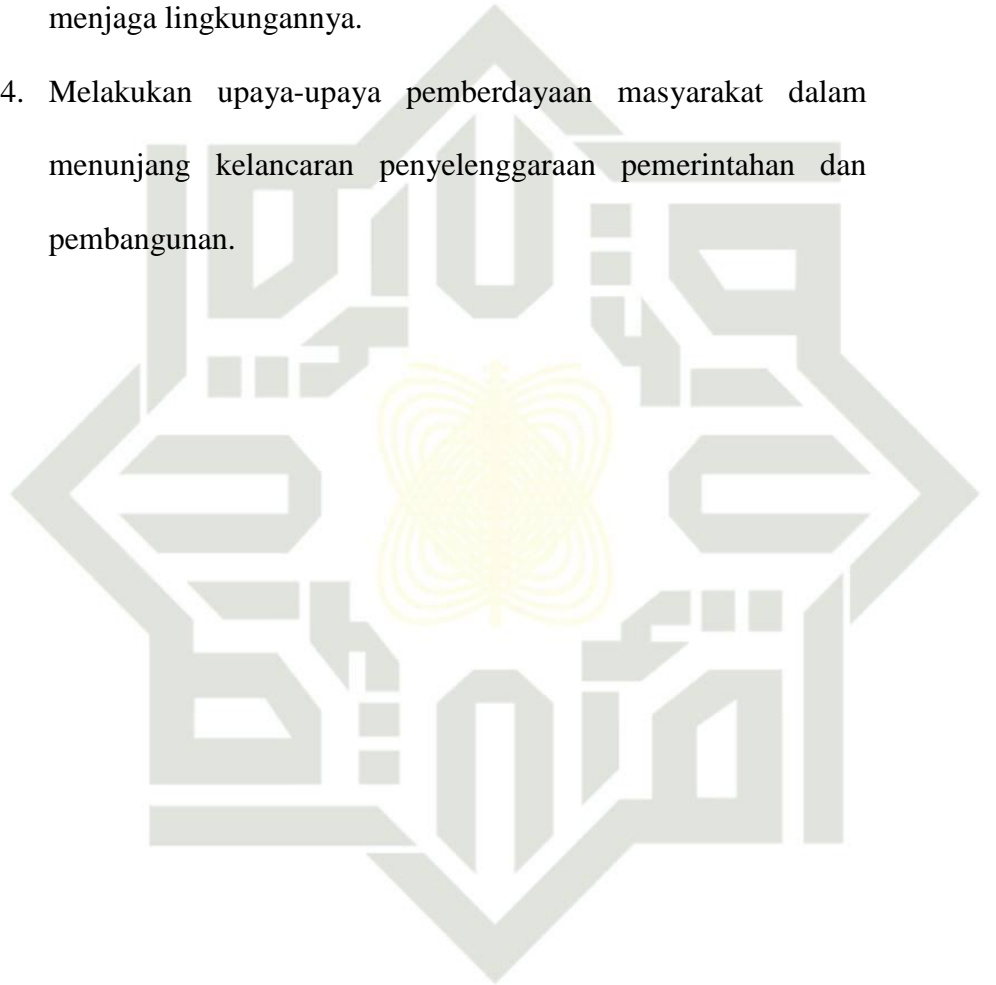
## 6. Kepala Dusun

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

- a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
  1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



UIN SUSKA RIAU

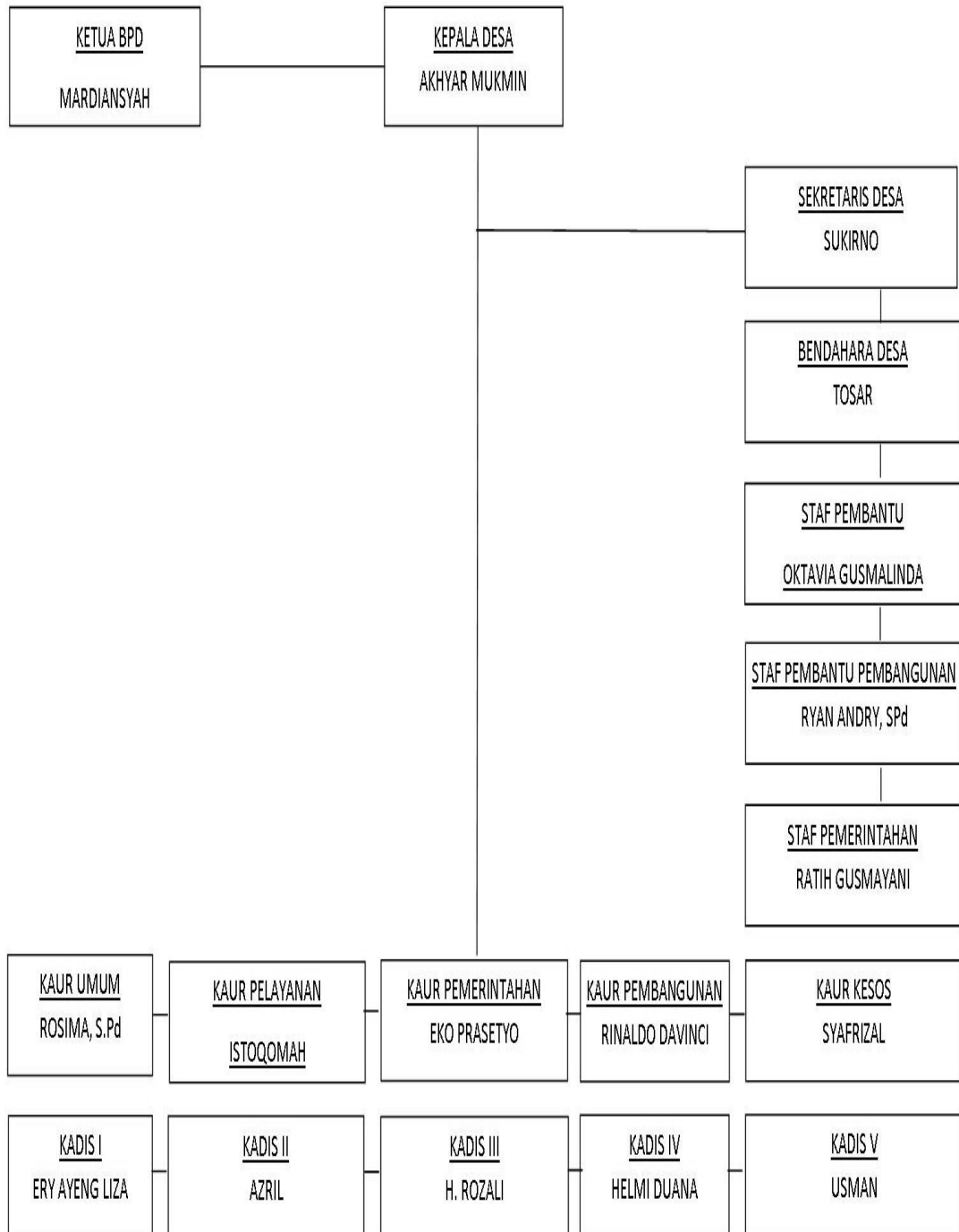
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4.1

**Bagan Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis**



Sumber : Kantor Desa Muara Basung Duri Tahun 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasannya Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Dalam Mengurangi Angka Kekurangan Gizi (Stunting) di Desa Muara Basung Duri dapat dikategorikan dalam kategori sangat tidak efektif karena disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

1. Pelaksanaan program Bantuan Sosial Non Tunai di Desa Muara Basung Duri dapat dikatakan belum terlaksana secara efektif . hal ini bisa dilihat dari jumlah penerima yang mendapatkan bantuan dengan jumlah penduduk miskin yang ada dikelurahan terkul tersebut. Selain itu juga terdapat ketidaktepatan sasaran penerima program bantuan, dimana terdapat KPM yang di anggap mampu namun masih terdaftar sebagai penerima manfaat program Bantuan Sosial Non Tunai. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya pemantauan satgas dan perangkat desa terhadap masyarakatnya dan kekeliruan dalam mengumpulkan data.

Pelaksanaan pancairan dana dan pendistribusian bantuan Sembako non tunai juga tidak berjalan dengan baik, karena dalam pencarian dana yang dilakukan setiap bulannya selalu mengalami kendala atau hambatan, hambatan itu antara lain disebabkan terjadi nya error saat pencairan dana, Id penerima yang ganda, saldo kosong dan sebagainya. Terkait dengan penggunaan kartu keluarga sejahtera juga masih belum dilaksanakan dengan

baik, karena masih ada KPM yang menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi diluar untuk transakasi program bantuan sembako non tunai ini.

untuk permasalahan bahan sembako yang disediakan oleh warung yang sudah ditunjuk oleh pihak TKSK sebagai tempat pendistribusian bahan sembako dinilai sudah cukup baik. Namun permasalahan yang terjadi dilasembako adalah agen memberikan kebebasan berbelanja kepada beberapa KPM untuk berbelanja sesuka hati dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pembahasan mengenai efektivitas dari pelaksanaan program bantuan sosial non tunai dalam menekan angka kekurangan gizi (Stunting) sudah dikatakan efektif ini dilihat dari hasil wawancara observasi dan data grafik yang menunjukkan bahwa dengan adanya program ini sudah menekan angka kekurangan gizi (stunting) yang berada di Desa Muara Basung duri.

### Saran

Adapun saran dari penulis untuk menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

Diharapkan adanya tinjauan ke lasembako dari pihak Desa maupun satgas Desa juga pendamping agar program BSNT ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan sesuai dengan indikator tepat sasaran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Diharapkan juga kepada setiap aparaturnya yang bertanggung jawab terhadap program bantuan sembako nontunai ini untuk dapat lebih transparansi mengenai segala hal terkhusus program bantuan ini.

Di harapkan adanya kesadaran dari masyarakat mampu yang masih menerima program BSNT untuk tidak menerima bantuan lagi dan segera mengembalikan kartunya, sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat dari bantuan program BSNT ini.





## DAFTAR PUSTAKA

### Alqur'an

Departemen Agama RI Alqur'an Alkarim dan Terjemahnya. Semarang. PT Karya Thoha Patra Semarang

### Buku

Akbar, H. U. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Cambel. 1989. "*Riset dalam Efektivitas Organisasi*". Terjemahan Salut Sinamora. Jakarta. Erlangga.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press,

Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press

Makmur. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Bandung : PT. Refika Aditama

Nisa, A. S. 2019. *Analisis Program Bantuan Sembako Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.

Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Bandung

Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Tafiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta :Bumi Aksara

Waharno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori dan Proses.*, Yogyakarta : Media Pressindo

### Jurnal

Angung, A. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Kota Palu*. Katalogis : Volume 6 Nomor 8 Agustus hlm 1-8

Amad, S. (2018). *Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jambi*. EKSIS, 9, 79-90.

Ana Rosalina, H. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sembako*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Mahasiswa UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Non Tunai. Public Administration Journal Volume 2 (2), April-Juni 2019, 2 (2)*

Benny, R. 2018. *Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Sembako Non-Tunai (Bpnt). Analisis Kebijakan Pertanian: Vol. 16 No. 1, Juni 2018, 1-18*

Ikhsan Surya Kharismawati, H. W. (2018). *Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*. *Jurnalmahasiswa.unesa.ac.id*, 1-7.

Rohana Tiara, M. (2019). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Palembang*. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJos)*, 3, 37-46.

Suci Laurentcia, R. Y. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang*. *Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X)*, 4, 7-17.

Supiani, B. S. (2020). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Pada E-Warung Di Desa Harus Kabupaten Tabalong*. *JAPB*, 3, 672-685.

Yunus, E. Y. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*. *REFORMASI*, 9, 138-152.

#### Skripsi

Dini, A. R. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sembako Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung*.

#### Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Umum Program Sembako tahun 2020

Permensos Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Dana Bantuan BSNT

PERPRES Nomor 10 Tahun 2017 *Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*

PERPRES Nomor 63 Tahun 2017 *Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT)*

#### Website

Berita Pusat Statistik (2018-2019). Diambil kembali dari [bps.go.id](https://bps.go.id)

Khalid Syahmudi, L. (t.thn.). Diambil kembali dari [Muslim.or.id: https://muslim.or.id/367-syarat-wajib-dan-cara-mengeluarkan-zakat-mal.html](https://muslim.or.id/367-syarat-wajib-dan-cara-mengeluarkan-zakat-mal.html)



Mustinda, L. (2020, Mei 14). Diambil kembali dari detiknews: [https://news.detik.com/berita/d-5014750/dalil-zakat-fitrah-dan-hukuman-bagiorang-yang-tidak-mau-berzakat t.thn.](https://news.detik.com/berita/d-5014750/dalil-zakat-fitrah-dan-hukuman-bagiorang-yang-tidak-mau-berzakat-t.thn.))

Repository.unimus.ac.id/1976/3/BAB%20II.pdf

Diambil kembali dari Global Zakat:

<https://www.globalzakat.id/tentang/definisi-asnaf>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DRAF WAWANCARA

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL NON TUNAI (BSNT) DALAM MENGURANGI ANGKA KEKURANGAN GIZI (STUNTING) DI DESA MUARA BASUNG DURI

Nama : Gita Tiara  
NIM : 11775200058  
Jurusan : Administrasi Negara

Berikut adalah draf pertanyaan wawancara yang ditujukan kepada Kepala Desa Muara Basung Duri, Sekretaris Desa Muara Basung, Satgas atau Pendamping Program BSNT dan Masyarakat Penerima Program BSNT :

1. Bagaimana kriteria masyarakat sebagai penerima BSNT?
2. Apa saja persyaratan masyarakat sebagai penerima BSNT?
3. Apa padoman pemerintah desa dalam melaksanakan BSNT?
4. Siapa saja yang terlibat pada pelaksanaan BSNT?
5. Bagaimana alur pemberian BSNT kepada masyarakat?
6. Bagaimana tahap seleksi pemberian BSNT?
7. Apa yang dilakukan oleh tim BSNT setelah melakukan sosialisasi?
8. Apakah aparat desa ikut membantu dalam menyiapkan persyaratan?
9. Bagaimana cara aparat desa dalam memberikan arahan ataupun sosialisasi kepada masyarakat?
10. Apakah masyarakat ikut serta dalam mengawasi jalannya kegiatan?
11. Bagaimana kegiatan program BSNT dilaksanakan?
12. Siapa sajakah yang terlibat dalam mengevaluasi dari kegiatan pelaksanaan program BSNT
13. Berapa kali evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan program BSNT?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14. Berapa kali pengawasan dilakukan oleh pendamping selama pelaksanaan program BSNT?
15. Apakah aparat desa dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan kepada masyarakat penerima bantuan?
16. Bagaimana aparat desa dalam memepertanggungjawabkan program BSNT kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan?
17. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BSNT?
18. Kapan program BSNT berlangsung di desa ini?
19. Siapakah yang berhak sebagai penerima Program BSNT?
20. Bagaimana keberhasilan dari program tersebut?
21. Apakah ada masyarakat yang menerima bantuan sosial ganda?
22. Apakah dalam penyaluran Program BSNT di desa muara basung sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan?
23. Apakah dana yang masuk melalui elektronik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di setiap KPM sudah tepat dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap bulannya di desa muara basung ?
24. Apakah dalam memilih penerima Program BSNT didesa muara basung sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan ?
25. Sudah berapa lama Program ini berjalan di desa muara basung ?
26. Apakah masyarakat sudah terbantu kebutuhannya dengan adanya program BSNT di desa muara basung ?
27. Jika timbul masalah dalam pelaksanaan program BSNT dalam pembagian sembako di desa muara basung, siapa yang akan bertanggung jawab ?
28. Berapa total masyarakat didesa muara basung duri?





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

29. Apakah dengan adanya program BSNT didesa muara basung sudah memenuhi kebutuhan gizi dimasyarakat sehingga bisa menekan bertambahnya jumlah angka stunting ?
30. Apakah dalam pelaksanaan program BSNT didesa muara basung sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah ?
31. Apakah dalam pelaksanaan program BSNT didesa muara basung yang telah dilaksanakan sudah tepat pada sasaran ?
32. Siapa saja masyarakat yang berhak menerima program BSNT ini ?
33. Setiap tanggal berapa jadwal pembagian program BSNT di desa muara basung ?
34. Apakah dalam sehari pembagian sembako BSNT selesai dilaksanakan ?
35. Apakah bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat desa muara basung sudah memenuhi standar layak konsumsi dan bisa untuk memperbaiki gizi masyarakat tersebut ?
36. Berapakah total seluruhnya masyarakat penerima program BSNT didesa muara basung ?
37. Berapa jumlah e-warung yang disediakan dalam pengambilan sembako didesa muara basung ?
38. Berapa besaran manfaat yang diterima oleh setiap KPM perbulannya ?
39. Sembako apa saja yang bisa diterima setiap KPM didesa muara basung ?

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Wawancara

#### 1. Wawancara Dengan Kepala Desa Muara Basung Duri



#### 2. Wawancara Dengan Satgas/Pendamping BSNT Desa Muara Basung



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Pemilik E-Waroeng Program BSNT



4. Pendistribusian Bahan Sembako BSNT di E-Warung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Penerima Program BSNT



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1433/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Pra Riset**

Pekanbaru, 23 Februari 2021 M  
11 Rajab 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

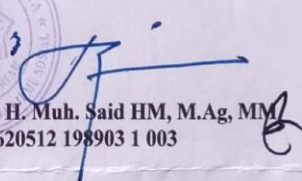
Nama : Gita Tiara  
NIM. : 11775200058  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) Dalam  
Mengurangi Angka Stunting di Desa Muara Basung Duri"** Untuk itu kami  
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada  
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,

  
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2187/2021  
S i f a t : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Maret 2021 M  
16 Sya'ban 1442 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Gita Tiara  
NIM. : 11775200058  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai Dalam  
Mengurangi Angka Stunting Di Desa Muara Basung Duri"** Untuk itu kami  
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada  
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM**  
NIP. 19620512 198903 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/41192  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : UN.04/F.VII/PP.00.9/21872021 Tanggal 30 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

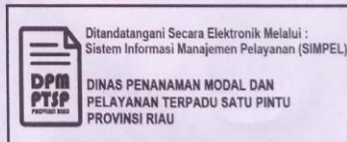
- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : GITA TIARA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11775200058  |
| 3. Program Studi     | : ADMINISTRASI NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : JL.KAMPUNG BARU RT.01/RW01 DURI  |
| 6. Judul Penelitian  | : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL NON TUNAI DALAM MENGURANGI ANGKA KEKURANGAN GIZI (STUNTING) DI DESA MUARA BASUNG DURI |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR DESA MUARA BASUNG DURI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 4 Mei 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KECAMATAN PINGGIR  
DESA MUARA BASUNG**

Jl. Batin Tarak No.09 Muara Basung Kode Pos 28784

Muara Basung, 05 Mei 2021

Nomor : 423.4/Pemdes-MB/V/2021/445  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Surat Riset/Pra Riset  
Tahun 2021

Kepada,  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Ilmu Sosial UIN Suska Suska Riau.  
Di  
Tempat.

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : UN.04/F.VII/PP.00.9/21872021 Tanggal 04 Mei 2021,  
Perihal Riset/Pra Riset 2021. Menerima Mahasiswa UIN Suska Riau melaksanakan Riset/Pra  
Riset dan Pengumpulan Data Kepada Mahasiswa :

Nama : GITA TIARA  
NIM/KTP : 11775200058  
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA  
Jenjang : S1  
Alamat : Jl. Kampung Baru Rt.001/Rw.001 Duri  
Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL  
NON TUNAI DALAM MENGURANGI ANGKA KEKURANGAN GIZI  
(STUNTING) DI DESA MUARA BASUNG**  
Lokasi : Kantor Desa Muara Basung

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas Telah melakukan  
kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi di Desa Muara Basung.

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

An.KEPALA DESA MUARA BASUNG  
K DES

